

ABSTRAK

SUHENDRY ANANTA (01657200034).

“LEGITIMASI PENERAPAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH ANGGOTA KOPERASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM.”

Halaman: XVI + 521, 11 Tabel, 1 Gambar.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam dapat menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam mengalami Kepailitan, disisi lain status Anggota adalah sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa Koperasi memiliki peran untuk mengembangkan Koperasi. Terlebih Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Anggota tanpa adanya Persetujuan dari Rapat Anggota sebagai Perangkat Tertinggi pada Koperasi. Anggota Koperasi memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU No. 25 Tahun 1992), Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Anggota, namun Anggota Koperasi memilih Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diatur pada Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004), dibandingkan menggunakan ketentuan UU No. 25 Tahun 1992. Rumusan Masalah pada Penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam? 2). Bagaimana Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam? 3). Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan Data Sekunder dan diperkuat dengan Data Primer, berupa wawancara dengan Biro Hukum Pengawasan Koperasi pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang - Undang dan Pendekatan Kasus berupa Putusan Pengadilan Niaga, serta Pendekatan *Economic Analysis of Law (EAL)* melalui metode *Regulation Impact Analysis (RIA)*. Penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam belum sepenuhnya efektif menjamin Pengembalian Dana Simpanan Anggota mengingat tidak adanya unsur Pemaksa pada UU No. 37 Tahun 2004, untuk itu diperlukan perubahan terhadap UU No. 37 Tahun 2004 dengan memasukkan unsur Pemaksa terkait Pelaksanaan Skema Pembayaran dan mensejajarkan kedudukan Koperasi Simpan Pinjam dengan Bank maupun perubahan terhadap UU No. 25 Tahun 1992 dengan memasukkan ketentuan mengenai Penjaminan atas Simpanan Dana Anggota pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), ketentuan Penyelesaian Perselisihan, ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan, ketentuan *Fit and Proper Test* bagi Pengurus dan Pengawas, serta ketentuan Pengawasan terhadap Dana Simpanan dan Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam.

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan.

ABSTRACT

SUHENDRY ANANTA (01657200034)

“LEGITIMACY ON THE APPLICATION OF POSTPONEMENT OF DEBT PAYMENT OBLIGATION BY THE MEMBER ON CREDIT UNION”

Page: XVI + 521, 11 Tables, 1 Figures.

Applications of Postponement of Debt Payment Obligation by the member of credit union can caused bankruptcy for a credit union, in other hand the status of the member is as an owner and the customer of it has a role to develop the business. Moreover the application for Postponement of Debt Payment Obligation that applied by the member without an approval of Members Meeting as the highest authorities in the credit union. Cooperative or credit union members have an obligation to obey the Law Number 25 of 1992 about Cooperatives (Law No. 25 of 1992), Articles of Association and Members Meeting Declaration, however the cooperative member chooses the postponement of debt payment obligation that regulated in Law Number 37 of 2004 about Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligation (Law No. 37 of 2004) instead of enforcing the provision on the Law No. 25 of 1992. Issues raised in this research are 1). How does the regulation of Postponement of Debt Payment Obligation by the member regulated in a credit Union? 2. How does the regulation of Postponement of Debt Payment Obligation by the member of credit union enforced? 3). What efforts that supposed to do by the members for the Postponement of Debt Payment Obligation on credit union? Research method used in this research is normative legal research that conducts based on secondary data and strengthen by primary data such as interview with Legal Bureau of Cooperative Controls at Ministry of Cooperatives and Small and Medium Sized Enterprises. The Approach used is legal approach and Case approach such as Commercial Court Decision, also Economic Analysis of Law Approach (EAL) through the method of Regulation Impact Analysis (RIA). The application of Postponement of Debt Payment Obligation by the member on Credit Union is not fully effective on guaranteeing the refund of member's deposit as there is no coercive element on Law Number 37 of 2004, thus it needs an amendment to Law Number 37 of 2004 by including coercive element regarding the implementation of payment scheme and aligning the position of credit union with a bank as well as amendment on Law No. 25 of 1992 by including a provision about Member's Deposit Guarantee Fund on the Deposit Insurance Corporation (LPS), provision about dispute settlement, provision of Postponement of Debt Payment Obligation and bankruptcy, provision of Fit and Proper Test for the managers and supervisors, also provision of Controls towards deposits and loans fund on Credit Union.

Keywords: Credit Union, Postponement of Debt Payment Obligation and Bankruptcy.